

VERBAL

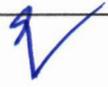
- | | | | |
|--------------------|-------------------|--|-------------------|
| 1. Dikerjakan Oleh | : BPKAD Kota Bima | 4. Diterima di Penerimaan Surat | : Bagian Hukum |
| | | 5. Dinomori oleh | : Bagian Hukum |
| 2. Diperiksa oleh | : Bagian Hukum | 6. Diketik oleh | : BPKAD Kota Bima |
| | | 7. Ditaklik/Dikaji oleh | : Bagian Hukum |
| | | 8. Diterima di Pengiriman Surat | : BPKAD Kota Bima |
| | | 9. Dikirim oleh | : BPKAD Kota Bima |
| 3. Diedarkan oleh | : BPKAD Kota Bima | 10. Verbal dan Pertinggal
Disimpan oleh | : Bagian Hukum |

DIAJUKAN PADA TANGGAL : 2020

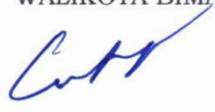
Perihal/Judul Naskah : PERATURAN WALIKOTA BIMA TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN MASING-MASING KELURAHAN LINGKUP PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN ANGGARAN 2020.

Kota Bima,

2020

No.	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bima		
3.	Kepala BPKAD Kota Bima		
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH :
WALIKOTA BIMA, 


MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN MASING-MASING KELURAHAN LINGKUP PEMERINTAH KOTA
BIMA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 4 Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen dan Format Laporan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Tahun Anggaran 2020, penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen dari Pemerintah Daerah salah satunya meliputi Peraturan Walikota tentang penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Masing-Masing Kelurahan Lingkup Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Handwritten signature in blue ink.

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);

✓ 2 ✓

12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 221);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN MASING-MASING KELURAHAN LINGKUP PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan Lingkup Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2020 yang diberikan selama setahun sebesar Rp 41.000.000.000,00 (Empat Puluh Satu Milyar Rupiah) yang bersumber dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 25.994.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah); dan
2. Dana Alokasi Umum Tambahan sebesar Rp15.006.000.000,00 (Lima Belas Milyar Enam Juta Rupiah).

Pasal 2

- (1) Besaran Dana Alokasi Umum Tambahan per kelurahan diberikan kepada 41 kelurahan masing-masing Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dalam mendukung program pemerintah sesuai dengan amanat Undang-undang yang bertujuan pemerataan keuangan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- (2) Rekapitulasi Dana Alokasi Umum Tambahan per Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Penetapan besaran Dana Alokasi Umum Tambahan masing-masing kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, merupakan ketentuan yang bersifat khusus.

Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal, 27 Februari 2020

WALIKOTA BIMA, ✓



MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal, 27 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2020 NOMOR 557



LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BIMA
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM
 TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
 KELURAHAN MASING-MASING KELURAHAN
 LINGKUP PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN
 ANGGARAN 2020

REKAPITULASI ANGGARAN MASING-MASING KELURAHAN
 KOTA BIMA TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN KELURAHAN		
		APBD	DAU TAMBAHAN	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
I	KECAMATAN RASANA E BARAT	3,804,000,000.00	2,196,000,000.00	6,000,000,000.00
1	KELURAHAN DARA	634,000,000.00	366,000,000.00	1,000,000,000.00
2	KELURAHAN PARUGA	634,000,000.00	366,000,000.00	1,000,000,000.00
3	KELURAHAN TANJUNG	634,000,000.00	366,000,000.00	1,000,000,000.00
4	KELURAHAN SARAE	634,000,000.00	366,000,000.00	1,000,000,000.00
5	KELURAHAN NA'E	634,000,000.00	366,000,000.00	1,000,000,000.00
6	KELURAHAN PANE	634,000,000.00	366,000,000.00	1,000,000,000.00
II	KECAMATAN RASANA E TIMUR	5,072,000,000.00	2,928,000,000.00	8,000,000,000.00
1	KELURAHAN NUNGA	634,000,000.00	366,000,000.00	1,000,000,000.00
2	KELURAHAN LELAMASE	634,000,000.00	366,000,000.00	1,000,000,000.00
3	KELURAHAN DODU	634,000,000.00	366,000,000.00	1,000,000,000.00
4	KELURAHAN LAMPE	634,000,000.00	366,000,000.00	1,000,000,000.00
5	KELURAHAN KODO	634,000,000.00	366,000,000.00	1,000,000,000.00
6	KELURAHAN KUMBE	634,000,000.00	366,000,000.00	1,000,000,000.00
7	KELURAHAN OI FO'O	634,000,000.00	366,000,000.00	1,000,000,000.00
8	KELURAHAN OI MBO	634,000,000.00	366,000,000.00	1,000,000,000.00
III	KECAMATAN ASAKOTA	3,804,000,000.00	2,196,000,000.00	6,000,000,000.00
1	KELURAHAN MELAYU	634,000,000.00	366,000,000.00	1,000,000,000.00
2	KELURAHAN JATIWANGI	634,000,000.00	366,000,000.00	1,000,000,000.00
3	KELURAHAN JATIBARU	634,000,000.00	366,000,000.00	1,000,000,000.00
4	KELURAHAN KOLO	634,000,000.00	366,000,000.00	1,000,000,000.00
5	KELURAHAN ULE	634,000,000.00	366,000,000.00	1,000,000,000.00
6	KELURAHAN JATIBARU TIMUR	634,000,000.00	366,000,000.00	1,000,000,000.00
IV	KECAMATAN MPUNDA	6,340,000,000.00	3,660,000,000.00	10,000,000,000.00
1	KELURAHAN PENATOI	634,000,000.00	366,000,000.00	1,000,000,000.00
2	KELURAHAN LEWIRATO	634,000,000.00	366,000,000.00	1,000,000,000.00
3	KELURAHAN SADIA	634,000,000.00	366,000,000.00	1,000,000,000.00
4	KELURAHAN MANDE	634,000,000.00	366,000,000.00	1,000,000,000.00
5	KELURAHAN MONGGONAO	634,000,000.00	366,000,000.00	1,000,000,000.00
6	KELURAHAN MANGGEMACI	634,000,000.00	366,000,000.00	1,000,000,000.00
7	KELURAHAN SANTI	634,000,000.00	366,000,000.00	1,000,000,000.00
8	KELURAHAN MATAKANDO	634,000,000.00	366,000,000.00	1,000,000,000.00
9	KELURAHAN SAMBINA E	634,000,000.00	366,000,000.00	1,000,000,000.00
10	KELURAHAN PANGGI	634,000,000.00	366,000,000.00	1,000,000,000.00
V	KECAMATAN RABA	6,974,000,000.00	4,026,000,000.00	11,000,000,000.00
1	KELURAHAN RABADOMPU TIMUR	634,000,000.00	366,000,000.00	1,000,000,000.00
2	KELURAHAN RABADOMPU BARAT	634,000,000.00	366,000,000.00	1,000,000,000.00
3	KELURAHAN RABANGODU UTARA	634,000,000.00	366,000,000.00	1,000,000,000.00
4	KELURAHAN RABANGODU SELATAN	634,000,000.00	366,000,000.00	1,000,000,000.00
5	KELURAHAN RONTU	634,000,000.00	366,000,000.00	1,000,000,000.00
6	KELURAHAN PENARAGA	634,000,000.00	366,000,000.00	1,000,000,000.00
7	KELURAHAN PENANA E	634,000,000.00	366,000,000.00	1,000,000,000.00
8	KELURAHAN RITE	634,000,000.00	366,000,000.00	1,000,000,000.00
9	KELURAHAN KENDO	634,000,000.00	366,000,000.00	1,000,000,000.00
10	KELURAHAN NTOBO	634,000,000.00	366,000,000.00	1,000,000,000.00
11	KELURAHAN NITU	634,000,000.00	366,000,000.00	1,000,000,000.00
	JUMLAH	25,994,000,000.00	15,006,000,000.00	41,000,000,000.00

WALIKOTA BIMA,

MUHAMMAD LUTFI

9